



## CABANG-CABANG IMAN

Ada sabda Rasul yang sangat terkenal bahwa iman itu bercabang-cabang. Iman itu selain berupa keyakinan tauhid, juga mewujudkan dalam tindakan menyingkirkan duri dari tengah jalan. Coba kita renungkan. Ketika kita membungkukkan badan menyingkirkan duri di tengah jalan, kelihatannya sederhana. Tetapi, di balik itu ada hal yang sangat prinsip, yaitu perhatian kepada sesama manusia. Kita tidak rela orang lain celaka terkena duri itu. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan, *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ketika ditanya, "Apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga?" Nabi menjawab, "Takwa kepada Allah dan budi pekerti luhur". Lalu ditanya, "Apa yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka?" Nabi menjawab, "Dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan"* (HR Ibnu Majah).



## CABANG-CABANG KESUFIAN

Tasawuf itu bercabang-cabang dan bermacam-macam. Karena itu kaum sufi ada tiga golongan: kaum sufi hakikat, kaum sufi rezeki, dan kaum sufi formalitas. Kaum sufi hakikat ialah mereka yang mencari pengertian dan mengalami kebenaran tertinggi dari pengalaman keruhanian. Sedangkan kaum sufi rezeki ialah mereka yang menerima wakaf seperti dalam *khâniqah-khâniqah* (rumah-rumah pondokan sufi). Mereka ini tidak harus dari kalangan hakikat, sebab hal ini sulit bagi mereka; dan para tokoh hakikat yang besar tidak terikat dengan ketentuan *khâniqah-khâniqah*, tetapi mereka diharuskan memenuhi tiga syarat: *pertama*, kelurusan dalam syariat sehingga mereka itu menjalankan ibadah-ibadah wajib dan menjauhi hal-hal yang terlarang; *kedua*, bertingkah laku sopan menurut ajaran kesopanan para ahli tarekat, yang dalam banyak hal kesopanan itu adalah juga kesopanan menurut syariat; sedangkan kesopanan bid'ah yang dibuat-

buat tidaklah perlu diperhatikan; *ketiga*, tidak dibenarkan seorang pun dari mereka terlalu memerhatikan kemewahan duniawi; jadi orang yang kerjanya hanya mengumpulkan harta, atau tidak berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan tidak beradab dengan adab syariat, atau orang itu fasiq, maka baginya tidak ada hak untuk termasuk golongan tersebut.

Adapun kaum sufi formalitas ialah orang-orang yang merasa cukup dengan sebutan (sebagai kaum sufi) saja, sebab yang penting bagi mereka ialah pakaian dan sopan santun buatan, dan seterusnya. Mereka ini dalam sufisme sama kedudukannya dengan orang yang merasa cukup dengan mengenakan baju *uniform* ahli ilmu (sarjana) atau ahli jihad, atau merasa cukup dengan meniru apa pun ucapan dan tingkah laku mereka, sehingga orang yang tidak tahu tentang keadaan yang sebenarnya menyangka bahwa orang itu termasuk golongan ahli ilmu atau jihad tersebut, padahal tidak.



## CARA BARU BERPOLITIK

Penting kiranya bila Islam di Indonesia didefinisikan secara lebih inklusivistis. Dengan demikian, simbol-simbol Islam harus terbuka

dan mampu dimengerti (*shared*) semua Muslim. Ini bukanlah suatu dalih untuk melakukan kompromi dan meninggalkan idealisme tinggi Islam. Tapi, masalahnya ialah bahwa harus ada suatu metode baru dakwah, yang menekankan *hikmah* (kebijaksanaan) dan *maw'idlah hasanah* (seruan yang baik), sesuai dengan petunjuk Al-Quran (Q., 16: 125), agar semua orang “mampu mendengar firman Allah” (Q., 9: 6).

Suatu upaya untuk mengakhiri citra eksklusivitis politik yang berorientasi Islam, menuntut sikap konsisten untuk mau mengorbankan hasil-hasil politik jangka pendek. Karena itu, upaya semacam itu harus fokus pada proses demokratisasi sebagai mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka, dan adil. Pada tingkat nasional, metode paling langsung adalah pembentukan suatu koalisi politik yang lebih luas—antara orang-orang yang saling punya perhatian kepada demokrasi—yang menuntut keterbukaan sikap. Tentu saja keterbukaan sikap bukanlah segala-galanya. Permasalahan kuncinya ialah bagaimana menciptakan kesalinghormatan di kalangan elite bangsa, dan di kalangan seluruh rakyat, sebab demokrasi adalah mustahil tanpa hal itu.

Melihat kembali pada masa lalu sejarah, gagasan semacam itu bu-

kanlah sama sekali tidak realistis. Modernisasi Islam Indonesia, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Haji Agus Salim, pada dasarnya bercorak inklusivistis. Tidaklah berlebihan bila dinyatakan bahwa awal demokrasi Indonesia—meski berumur pendek—sebagian besarnya adalah kontribusi politisi yang berorientasi Islam dan sekaligus berpendidikan Barat asuhan Salim. Sebagai seorang Bapak intelektualisme Islam Indonesia, “Haji Agus Salim adalah seorang Muslim dengan simpati sosialis, seorang dengan prinsip tinggi yang tidak sudi mengorbankan keyakinan-keyakinannya untuk kelayakan (*expediency*).” Dia termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap penanaman semangat demokratis dan sikap terbuka di hati kaum muda Muslim, yang kemudian tampil menganjurkan pikiran liberal dan sosialis Barat, dan mendukung kemajuan, stabilitas, dan toleransi.

Dalam analisis itu, suatu cara baru berpikir tentang politiklah yang dituntut dari setiap intelektual Muslim Indonesia. Karena sumber bangsa terbatas, maka pemerintah tidak dapat berupaya memenuhi tuntutan setiap kelompok. Terlebih, sumber-sumber itu lebih daripada sekadar bersifat finansial atau ekonomi. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam perkembangan bangsa selama empat dasawarsa ini, apa

yang dapat dilakukan oleh politik dan pemerintah bersifat terbatas. Satu hal yang kita tahu pasti bahwa apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah memelihara kesatuan dan keutuhan Republik. Tetapi, perkembangan nasional dalam arti terluas memerlukan lebih dari sekadar kesatuan dan keutuhan bangsa. Ia memerlukan sumber-sumber manusiawi dengan kemampuan organisasional dan manajerial, di sektor privat dan umum, yang selalu saja kurang. Karena masyarakat telah memberi pemerintah banyak tanggung jawab penting, dari menciptakan dan memelihara keamanan nasional sampai menciptakan suatu sistem keadilan, maka penting kiranya bila pemerintah melakukan dengan baik tugas-tugas yang diupayakan untuk dilaksanakannya itu. Tampilnya intelektual-intelektual Muslim (santri) dan orang-orang berpendidikan lainnya akan sangat membantu pemerintah yang bermaksud baik semacam itu.



## CARA IJTIHAD

Suatu *ijtihad* untuk melaksanakan suatu ajaran, bagaimanapun dituntut harus mengetahui secara tepat lingkungan sosial budaya tempat ajaran itu hendak dilaksanakan. Sudah barang tentu yang pertama-

tama diperlukan adalah adanya pengetahuan yang tepat tentang ajaran itu sendiri, sebab jika hal ini tidak terpenuhi, dengan sendirinya akan mengakibatkan pelaksanaannya yang tidak tepat pula, yang akan menjadi sumber kesalahan dan kekeliruan prinsipil.

Namun, pengetahuan yang tepat tentang ajaran tidak menjamin pelaksanaan yang tepat, di mana diperlukan pengetahuan yang tepat tentang lingkungan sosial budaya yang bersangkutan, serta memahami tuntutan-tuntutan spesifik dan restriksi-restriksi yang diakibatkannya. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tersebut, maka setiap usaha pelaksanaan ajaran akan terjerembab ke dalam normativisme, yaitu sikap berpikir menurut apa yang seharusnya, kurang menurut apa yang mungkin. Normativisme semacam itu akan mengakibatkan sikap-sikap dan tuntutan yang tidak realistis, bahkan berakibat jauh lebih buruk daripada itu. Gabungan kekecewaan demi kekecewaan dan kejengkelan demi kejengkelan akibat rentetan kegagalan mencoba melaksanakan ajaran-ajaran yang diyakininya—kegagalan itu justru disebabkan oleh sikap-sikap dan tuntutan-tun-

tutan yang tidak realistis itu sendiri—normativisme justru akan dengan mudah mendorong orang ke arah sikap mental perasaan kalah dan putus asa (yang sering mengendap ke bawah sadar). Normativisme akan menjerumuskan orang ke arah tindakan-tindakan destruktif.



### CARA MEMBELANJAKAN HARTA

Seperti diilustrasikan oleh Al-Quran, ciri orang beriman adalah golongan atau kelompok orang yang apabila membelanjakan atau menafkahkan hartanya, mereka tidak kikir dan tidak boros. Sikap berlebih-lebihan yang dikenal dengan sikap suka berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang bukanlah ciri orang beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan, *Mereka yang membelanjakan harta tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, tetapi mengambil jalan tengah* (Q., 25: 67).

Namun perlu diingat, yang dimaksudkan dengan kalkulasi rasional tersebut tidak boleh dipahami sama dengan sikap menimbun harta. Dalam istilah sekarang disebut berlaku kapitalis, karena merasa

---

*“Janganlah kamu mengutuk waktu, karena waktu itu adalah (milik) Tuhan.”*

(Hadis)

harta itu sebagai hasil usahanya, maka ia dapat berbuat apa saja dengan harta tersebut. Dalam Islam, harta memiliki nilai atau dimensi pertanggungjawaban. Sikap menimbun harta sama dengan mengabaikan aturan moral dan etika sosial yang berlaku. Sikap menimbun harta sangat dikutuk oleh Al-Quran karena mengindikasikan pelalaian terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, *Menimbun kekayaan (di dunia ini) telah membuat kamu lalai (dari hal penting lainnya). Sampai kamu mengunjungi kuburan (masuk ke dalam kubur—NM) (Q., 102: 1-2).*

Lain permasalahannya dengan menafkahkan harta demi kepentingan pendidikan anak-anak, seberapa banyak pun jumlahnya. Karena pendidikan justru sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Anak dalam Islam, seperti harta, juga memiliki segi-segi tanggung jawab. Di antara wujud tanggung jawab orangtua kepada anaknya adalah memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Al-Quran mengingatkan orang beriman agar berhati-hati dengan meninggalkan generasi atau anak-anak yang lemah kualitasnya, sehingga mereka tidak dapat memainkan peran semestinya karena tersisihkan dalam persaingan hidup. Al-Quran menyebutkan, *Hendaklah ada rasa takut pada mereka yang sekiranya meninggalkan*

*keturunan yang tak berdaya, khawatir akan nasib mereka (Q., 4: 9).*

Dari situ terlihat bahwa Islam juga mengajarkan semangat altruisme atau menyayangi dan peduli kepada orang lain. Perwujudan altruisme yang paling baik adalah memerhatikan pendidikan anak.



#### CARA MEMPEROLEH DAN MEMPERLAKUKAN HARTA

Ada cara-cara yang tidak dibenarkan dalam memperoleh harta, seperti melakukan penyuapan (*bribery*) dan kolusi lewat mafia hukum sebagai alat legalisasi. Hal ini terungkap dalam firman-Nya, *Dan janganlah kamu memakan harta kamu di antara sesama kamu secara tidak sah, juga janganlah digunakan untuk menyuap para hakim, dengan tujuan agar kamu dapat memakan sebagian harta orang dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui (Q., 2: 188).*

Sedangkan praktik menimbun harta sehingga membuat dirinya menjadi budak harta dan melalakan Allah Swt., bahkan sampai pada batasan anggapan dan keyakinan bahwa hartanya dapat melanggengkan dan mengabadikan hidupnya, merupakan hal yang benar-benar dikutuk Al-Quran sebagaimana dinyatakan, *Menimbun kekayaan (di*

*dunia ini) telah membuat kamu lalai (dari hal penting lainnya). Sampai kamu mengunjungi kuburan (masuk ke dalam kubur—NM) (Q., 102: 1-2).*

Di sisi lain, juga perlu diingat bahwa Al-Quran pun menganjurkan agar tidak menjauhkan diri dari harta. Karena sesungguhnya harta, kehidupan dunia, dan segala isinya adalah karunia Allah Swt. yang sengaja diperuntukkan demi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, *Katakanlah, “Siapa yang mengharamkan perhiasan (anugerah) Allah yang disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan segala yang baik dan bersih berupa rezeiki?” Katakanlah, “Semua itu untuk mereka yang beriman dalam kehidupan dunia ...” (Q., 7: 32).*

Hal tersebut, dengan sendirinya, juga mengimplikasikan bahwa harta dalam Islam mengandung ajaran kesucian, karena di dalamnya ada nilai tanggung jawab, yaitu harta dipandang sebagai amanah pemberian Allah Swt.

Dalam Islam, pemilikan harta (*ownership*) adalah sebatas sebagai *mustakhlaf‘alayh*. Artinya pemilikan harta dalam Islam tidak mutlak atau

absolut sehingga dapat menggunakan hartanya seenaknya, seperti yang terjadi di negara-negara Barat, kapitalis liberal. Di Barat, orang sah-sah saja membakar atau memberikan hartanya kepada siapa saja yang ia mau, bahkan ada yang mewariskan hartanya untuk anjing kesayangannya.

Dalam Islam, pemberian hibah pun diatur oleh agama, seperti juga dalam masalah warisan. Seseorang tidak boleh mewariskan harta yang dimiliki semaunya karena hal itu sudah diatur oleh ajaran agama Islam,

yakni hukum waris. Itulah sebabnya, orang yang memiliki harta, dengan sendirinya memiliki konsekuensi atau tanggung jawab. Tanggung jawab atas bagaima-

mana ia menggunakan hartanya. Dengan kata lain, dalam Islam ada tuntutan moral dan etika dalam masalah harta, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, *Dialah yang menjadikan kamu sebagai wakil-wakil di bumi dan mengangkat derajatmu, yang seorang di atas yang lain, untuk menguji kamu atas karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu (Q., 6: 165).* Atau seperti yang ditegaskan pada akhir atau pe-



nutup surat Al-Takâtsur, yakni *Kemudian, pasti kamu ditanyai hari itu tentang kenikmatan (yang kamu perturutkan [megah-megahkan—NM])* (Q., 102: 8).



## CARA MENYIKAPI AL-QURAN

Barangkali, bahasa dunia yang mewakili untuk penerjemahan Al-Quran adalah bahasa Inggris yang juga kaya akan ungkapan atau idiom. Tetapi, sekali lagi, bahasa Inggris pun diakui oleh para ahli sebagian bahasa yang belum mampu menampung makna-makna, kedalaman, dan ketajaman bahasa yang ada dalam Al-Quran.

Al-Quran sebagai Kitab Suci membutuhkan kesiapan ruhaniah untuk dapat dipahami dan dibaca. Al-Quran bukan kitab magis atau kumpulan mantra-mantra yang memiliki kekuatan magis dan dapat menimbulkan efek-efek tertentu sehingga apabila dibaca atau dibawa akan dapat memberikan pengaruh atau perlindungan sebagaimana yang diyakini. Sikap-sikap yang demikian itu dapat dikategorikan sikap religio-magis.

Namun, sebagaimana diketahui, Al-Quran sejalan dengan *grand design* Allah Swt. sebagai Kitab Suci yang diturunkan dengan maksud sebagai sumber petunjuk dan tun-

tunan yang harus direnungkan (*ta-dabbur*) pesan-pesannya. Dengan demikian, Al-Quran mampu menjadi petunjuk bagi orang beriman dalam menjalani kehidupan, baik dunia maupun akhirat.

Dalam menyikapi Kitab Suci Al-Quran, memang kemudian ditemukan tingkatan yang berlapis-lapis. Yang *pertama* adalah tingkat jasmaniah, diindikasikan dengan gambaran seseorang yang mau mengambil, membuka, dan membaca Al-Quran. Kemudian meningkat pada tingkat *kedua*, yakni tingkat psikologis yang ditandai dengan adanya predisposisi kemauan untuk memahami, kemudian disusul dengan tingkat ruhaniah. Dan tingkat yang paling tinggi adalah rasional, yakni mau merenungkan dan memikirkan pesan-pesan kandungan Al-Quran itu sendiri.

Untuk dapat mencapai tahap-tahap tersebut, barangkali dapat dibuatkan analogi atau kiasan pada orang-orang yang gemar mendengarkan lagu-lagu Barat, yang tentunya berbahasa Inggris. Meski mereka kebanyakan tidak mengetahui atau memahami arti lagu tersebut karena alasan bahasa, namun tampak bahwa mereka juga dapat menikmati lagu tersebut, paling tidak lewat ritmenya.

Hal yang serupa juga disamakan dengan kasus membaca Al-Quran. Yang utama adalah kesiapan ruha-

niah untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, artinya tanpa harus terhalang oleh alasan tak mampu berbahasa Arab. Dengan mendengarkan ritme Al-Quran, seseorang sudah dapat merasakan ketenangan, keheningan, serta ketenteraman batin dan jiwa.

Yang demikian itu terjadi karena kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan *kalâm* atau firman Allah Swt. Sehingga bila mendengarkan Al-Quran, kita

juga sedang mendengarkan perkataan atau *kalâm* Allah Swt. dan itu memberikan efek tersendiri dalam jiwa kita.

Sebagaimana diklaim Al-Quran, ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang mudah menerima responsif ketika mendengarkan irama Al-Quran. *Orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut (nama—NM) Allah, tergetar (gemetar—NM) hatinya dan bila ayat-ayat-Nya dibacakan kepada mereka, bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhan mereka tawakal* (Q., 8: 2).

Al-Quran adalah Kitab Suci yang kebenaran ayat-ayatnya tidak disangsikan oleh kalangan umat Islam. Pernah dalam sejarah muncul

sekelompok orang Islam yang menyatakan keberatan bahwa ayat surat Yûsuf (Q., 12) tidak termasuk dari bagian Al-Quran, karena di dalamnya mengandung romantisme kisah cinta Yusuf dan Zulaikha.

Namun, kemudian dalam perjalanan sejarah, pandangan seperti

itu gugur dengan sendirinya karena kisah romantisme dalam Al-Quran itu kemudian disusul dengan pesan-pesan moral yang sangat tinggi. Seperti perkataan

Nabi Yûsuf ketika menghadapi godaan sebagai berikut, “*Dan aku tidak menyatakan diriku lepas dari kesalahan, karena nafsu (manusia) mendorong kepada kejahatan, kecuali yang sudah mendapat rahmat Tuhan-ku. Sungguh Tuhan-ku Maha Pengampun, Maha Pengasih*” (Q., 12: 53).



## CENDEKIAWAN DAN POLITIK

Sebaiknya seorang agamawan itu tidak berpolitik. Bahkan sebaliknya seorang agamawan harus berada di satu daerah yang dapat berdiri bebas. Begitu juga cendekiawan, terutama cendekiawan yang sejati, dan



tidak namanya saja, sebab banyak orang yang secara umum disebut cendekiawan, tapi penampilannya birokrat. Sebagai contoh, profesi wartawan sebenarnya bisa dimasukkan sebagai cendekiawan. Jadi menurut saya, redaktur-redaktur, penulis-penulis, wartawan, profesor, akademisi, atau yang menjadi *opinion maker*, sebaiknya tidak mengikatkan diri secara formal ke suatu kekuatan politik. Mereka ini seharusnya menjadi kekuatan moral cadangan. Fungsi mereka adalah menyuplai pikiran-pikiran. Atau dengan kata lain, mereka ini bebas tapi aktif.



## CERITA NABI MUSA DAN KHIDIR

Al-Quran banyak menggunakan air sebagai simbol kehidupan. “*Mâ’an ghadagan*” (air yang melimpah) berarti kehidupan bahagia, lahir dan batin. Dalam sistem agama lain, air juga dijadikan sebagai simbol kehidupan, seperti digambarkan dalam cerita tentang Nabi Musa yang mau bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa ditanya oleh para pengikutnya tentang siapa yang lebih darinya, ia menjawab tidak ada. Mendengar kesombongannya Nabi Musa, Tuhan marah dan berkata, “Ada yang lebih hebat dari kamu!”

“Di mana dia?”

“Cari saja di tepi laut!”

Ketika Nabi Musa mencari dan beristirahat di sebuah batu, bekal ikan yang sudah digoreng ternyata hidup kembali dan masuk ke laut. Ini seperti diceritakan dalam surat Al-Kahfi tentang pertemuan antara dua air yang kemudian menjadi landasan kaum tarekat sebagai tempat ideal untuk berzikir.

Di tempat ini, Nabi Musa mendapatkan orang yang tidak begitu mengesankan. Ketika ditanya apakah dia yang dikatakan lebih hebat darinya, Nabi Khidir menjawab tidak tahu. Karena merasa penasaran dan hendak mengetahui siapa dia, Nabi Musa meminta untuk ikut dengannya. Dengan tegas Nabi Khidir menolak karena yakin Nabi Musa tidak akan tahan melihat tingkah lakunya nanti. Tapi dengan janji tidak akan macam-macam, hanya ikut tunduk saja tanpa protes, akhirnya Nabi Musa diizinkan ikut juga.

Mereka kemudian menyeberangi selat dan naik perahu. Di tengah perjalanan ketika melihat perahu, perahu itu dirusak. Nabi Musa tidak tahan melihat kejadian itu dan protes. Dengan enak orang itu menjawab, “Kan sudah saya bilang kalau kamu tidak akan tahan mengikuti aku.” Ketika sampai di pantai dan bertemu dengan anak-anak yang sedang bermain riang, diambil

salah satu dari mereka dan ditem- peleng sampai mati. Nabi Musa marah sekali dan berkata, “*Aqatalta nafsan zakīyatan bi ghayri nafsin*” (*Apakah engkau membunuh seorang jiwa yang suci bersih tanpa kesalahan seperti ini?* [Q., 18: 74]). Lagi-lagi, orang itu dengan tenang berkata “Kan sudah saya bilang kalau kamu tidak akan tahan ikut aku.” Kemudian Nabi Musa minta maaf.

Sampai di sebuah desa dan ke- duanya sudah lapar dahaga, tetapi tidak seorang pun menjamu mereka walau sudah diminta. Meskipun demikian, ketika melihat rumah yang mau roboh, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk mem- perbaikinya. Dengan dalih per- lakuan desa yang tidak bersahabat tadi, Nabi Musa keberatan untuk memperbaiki rumah itu.

“Protes yang ketiga. Dan inilah saatnya kita harus berpisah karena kamu tidak tahan mengikuti aku. Tetapi sebelum berpisah, saya akan menerangkan dahulu mengapa saya melakukan itu semua. Tentang pe- rahu, saya merusaknya karena di se- berang sana sedang menunggu pe- rampok-perampok yang akan me- rampasnya. Jadi, saya rusak supaya tidak dirampas oleh perampok-pe- rampok itu. Tentang anak kecil yang sedang bermain itu, saya membunuhnya karena saya men- dapat wahyu dari Tuhan bahwa ke- tika besar nanti, ia akan durhaka

kepada kedua orangtuanya, padahal kedua orangtuanya itu saleh. Jadi, saya bunuh dengan harapan nanti Allah akan menggantinya dengan anak yang saleh. Sedangkan rumah yang mau roboh tadi, di dalamnya ada harta yang tersimpan untuk anak-anak yatim yang sekarang ber- ada di kota. Jadi, rumah itu kita ba- ngun agar harta itu tetap utuh sam- pai saatnya anak yatim itu dewasa dan bisa memanfaatkannya.”

Cerita di atas sering dipandang sebagai cerita konflik atau ketegang- an antara lahir yang tidak sanggup menerobos orientasi batin. Maka pencerahan yang dimaksud adalah dalam arti penembusan batas, *‘ibrāh, i’tibār*, tingkah laku atau tindakan menyeberang. Maksud- nya, orang tidak berhenti pada as- pek lahir, tetapi mencoba mema- hami apa yang ada di sebelahnyanya. Hal demikian penting mengingat agama sebenarnya merupakan sis- tem simbol; orang baru akan men- gerti dengan benar jika sanggup *menyeberangi* simbol-simbol itu. “*Fa‘tabiû yâ ûlî ‘l-abshâr*”, *karena itu menyeberanglah wahai orang- orang yang mempunyai pikiran men- dalam* (Q., 59: 2). “*Wa mâ ya‘qilu- hâ illâ ‘l-‘âlimûn*, artinya *tidak ada yang bisa memahami secara rasional kecuali mereka yang berpengalaman* (Q., 29: 43).



## CERITA TENTANG GUS DUR

Sebagaimana sering menjadi penilaian para pengamat dan media asing, Gus Dur itu—kontras dengan Pak Harto—sangat simbolik dan representatif; dari suatu rezim yang demikian represif totaliter menjadi rezim yang demikian bebas. Dulu orang mengatakan: “sekali merdeka tetap merdeka!”, namun sekarang: “sekali merdeka, merdeka sekali!” Tetapi itulah risikonya, karena sebelumnya kita tidak pernah mengalami keadaan semacam itu.

Sekarang coba kita bertanya pada diri kita masing-masing apakah ada cara lain kecuali tampilnya Gus Dur pada SU MPR tahun 1999 yang lalu? Jawabannya kita semua sudah tahu: tidak bisa, karena waktu itu kita diancam oleh “perang saudara”. Bayangkan kalau waktu itu Habibie yang naik, mungkin Jakarta ini sudah menjadi hangus, menjadi abu. Tetapi sebaliknya, kalau Mega yang naik, barangkali gerakan-gerakan separatis akan menjadi kenyataan. Itulah realitas yang kita hadapi waktu itu. Maka Gus Dur ketika itu tidak saja pilihan, tetapi juga penyelesaian. Tetapi tentu kita mengharapkan hal yang mustahil, maksudnya yang kita harapkan dari Gus Dur sebetulnya adalah persoalan menghadapi krisis yang berjangka pendek. Setelah

selesai, maka Gus Dur sudah menjadi tidak relevan, seperti menghadapi masalah ekonomi, masalah penumbuhan demokrasi yang melibatkan persoalan pembinaan hubungan antarkelompok yang lebih terbuka, partisipatif, dan mengenal adanya pendelegasian norma dan pembagian kerja, yang menekankan masalah akuntabilitas dan transparansi, dan sebagainya. Namun sayangnya, Gus Dur tidak mengenal itu. Padahal semua itulah yang akan mengukuhkan nilai-nilai etis dan moral dari sebuah negara modern (*modern nation state*).

Bukankah dulu Bung Karno, Pak Harto, dan Habibie mengawali kepemimpinan mereka dengan kondisi yang sama? Pertanyaan semacam itu memang bisa dibalik. Apakah Bung Karno dan Pak Harto dulu memiliki itu semua, ternyata tidak. Untuk memahami persoalan Bung Karno berkaitan dengan ini, lihat saja sebutannya dari *bung* menjadi *bapak*. Itu berarti dari suatu penampilan diri sebagai seorang pemimpin sebuah negara modern yang egaliter menuju kepada sebuah negara yang feodal; ketika dia sudah mulai ingin disebut sebagai bapak atau pemimpin besar, ini berarti kembali kepada asalnya. Itu berarti bahwa dia suka atau menikmati disebut *bung* secara artifisial, yaitu karena pengaruh dari apa yang dia baca. Ini sebenarnya

sangat ironis. Bung Karno sering mengkritik orang sebagai “*text-book thinking*”. Tapi kalau melihat kenyataan itu, maka sebenarnya dia-lah “*text-book thinker*” yang paling besar karena tidak menghayati apa yang dia baca. Itu pula yang me-

nyebabkan dia bertengkar dengan Bung Hatta. Sebab Bung Hatta selain membaca juga mengalami, karena dia belajar di Belanda. Bahkan

pengalamannya terwujud dalam bentuk pelibatan yang sangat jauh, karena dia diadili di sana; dia juga mengerti apa itu demokrasi dalam operasinya. Sedangkan Bung Karno tidak, dia hanya mengetahui bibitnya.

Kita semua mengetahui bahwa Bung Karno berakhir dengan malapetaka politik tahun 1965. Kemudian tampil Pak Harto, yang menyelesaikan masalah bangsa dengan caranya sendiri yang sangat efisien dan efektif, dan berlangsung selama 32 tahun. Bandingkan dengan Bung Karno yang hanya 20 tahun (dari 1945-1965), dan itu pun hanya berlangsung 5 atau 6 tahun saja, di mana Bung Karno tampil sebagai penguasa yang efektif. Mengapa? Karena Pak Harto itu

seperti laser. Dia bisa menembus baja, tapi kanan kirinya gelap. Kalau laser itu mengenai kita, maka bisa mati. Lasernya ialah kombinasi keefektifan sistem kepemimpinan yang hierarkis dari budaya Jawa dan militer. Jadi, karena ada garis ko-

mando yang begitu jelas, dengan sendirinya efektif. “Kegelapan” di kanan-kirinya merupakan metafora yang membawa kepada kebuntuan pada tahun ’98.

Semua itu ternyata

tidak cocok dengan ide keindonesiaan yang lebih besar. Oleh karena itu dia bertabrakan (dengan ide tersebut—*ed*) dan gagal. Kemudian Pak Harto turun dari panggung kekuasaan dengan meninggalkan atau mewariskan persoalan yang dilambangkan dalam kasus Habibie versus Mega. Lalu kita mengetahui bahwa persoalan Habibie dan Mega itu hanya bisa diselesaikan dengan naiknya Gus Dur.

Kenapa harus Gus Dur? karena persoalannya ialah ancaman adu fisik. Kalau sama-sama sipil, maka yang paling kuat (dalam soal adu fisik—*ed*) memang NU. Untuk se-kadar introspeksi, saya sedikit mau bercerita dengan mengambil yang lain. Mengapa Gus Dur dulu berusaha untuk menghapus Tap MPR

---

Disebabkan berbagai latar belakang masing-masing manusia yang berbeda-beda . . . maka agama menjadi beraneka ragam dan berbeda-beda meskipun pangkal tolaknya sama, yaitu naluri untuk percaya kepada wujud mahatinggi tersebut.

No. XXV tahun 1966 (tentang pelarangan penyebaran ajaran marxisme dalam berbagai bentuknya—*ed*), itu sebetulnya isyarat bahwa Gus Dur menghadapi persoalan yang rumit sekali. Pada tahun 1955 sampai 1960-an, musuh PKI pada tataran wacana intelektual-ideologis ialah Masyumi dan PSI. Tetapi secara fisik, musuh PKI yang riil adalah NU. Sebab yang berkelahi dengan PKI adalah orang NU. Sekarang jumlah anggota PKI itu 6 juta orang. Taruhlah misalnya setiap keluarga 5 orang, maka berarti kira-kira 1 juta keluarga. Sekarang bayangkan dari 1 juta keluarga PKI pada tahun 1965-1966, apabila yang memiliki anak baru, misalnya separuhnya saja, maka kira-kira anak yang terlahir akan berjumlah 500 ribu. Nah, anak-anak ini lahir tahun 1965-1966 dan dibesarkan di dalam rumah tangga yang memiliki dendam, pasti akan ada cerita tentang apa yang terjadi pada bapaknya, pamannya, temannya, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba, misalnya, kenapa saya tidak bisa menjadi pegawai negeri. Kenapa Mbok? Kenapa Pak? Jawabannya pasti karena kamu keluarga PKI.

Apa ciri-cirinya keluarga PKI? Ketika mereka berdiri sendiri, kenangan pahit ini bersifat individual. Tetapi ketika mereka komunikasi satu sama lain, maka akan berkembang *me-too-ism*, “saya juga”. Memori itu berkem-

bang dari memori individual menjadi memori kolektif. Dalam keadaan kolektif itu, maka individu menjadi hilang, lebur di dalam komunitas. Mereka selalu dihalang-halangi ke mana-mana, seperti yang menimpa orang-orang Masyumi. Mereka juga selalu dihalangi oleh Bung Karno dan kemudian juga oleh Pak Harto. Namun apa yang terjadi? Mereka menyerbu sekolah. Karena itu, semua perguruan tinggi sekarang ada di tangan orang-orang yang sedikit banyaknya memiliki hubungan dengan Masyumi. Begitu juga PKI. Karena anak-anak mereka tidak bisa ke mana-mana (karena dihalang-halangi tadi—*ed*), maka akhirnya menyerbu dunia pendidikan, bahkan tidak sedikit di antaranya yang ke luar negeri. Secara kolektif mereka mempunyai kenangan yang sama, dan karena itu ada dendam kolektif. Ini yang berbahaya.

Dengan menghilangkan Tap MPR (mengenai Partai Komunis), Gus Dur sebetulnya—atau seolah-olah—mau menjabat tangan, “Sudahlah kita berdamai, lupakan yang lalu!,” kira-kira begitu. Tetapi tentu hal ini tidak mudah dilakukan karena dia berhadapan dengan umatnya sendiri yang dulu memang punya pengalaman berhadapan dengan orang-orang itu. Jadi, artinya, Gus Dur dalam posisi yang sangat strategis untuk bisa melakukan itu semua.



## CERITA TENTANG PAK HARTO

Dulu, Pak Harto menjadi presiden disambut sebagai titisan dari Sabdo Palon. Untuk teman-teman yang bukan dari Jawa, ada semacam dongeng. Ketika Majapahit dihancurkan, dan notabene yang menghancurkan adalah orang dalam, Raden Patah, konon pendeta yang terbunuh bernama Sabdo Palon bangkit dari kuburnya dan sesumbar, tunggu 500 tahun lagi kami akan bangkit dan menghancurkan mereka yang menghancurkan Majapahit. Itu terjadinya pada tahun Saka 1400 atau tahun 1478 M. 500 tahun setelah itu berarti 1978. Pada saat itu mestinya keturunan Raden Patah (Islam) hancur, tetapi sebaliknya ternyata malah besar melalui dunia pendidikan.

Maka, ketika Pak Harto muncul, ada ruang gerak bagi Jawanisme yang luar biasa besarnya. Misalnya, mereka menginginkan aliran kepercayaan diakui sebagai agama. Adapun yang menentang habis-habisan adalah orang NU, terutama K.H. Jusuf Hasjim. Sampai sekarang, hal-hal kecil masih ada di dalam pikiran mereka, misalnya menginginkan bahwa penulisan kata Maha Esa itu diubah jadi Mahaesa (disambung), sehingga mudah sekali menjadi Mahesa. Mahesa itu kerbau. Karena itu Pak Yusuf Hasjim benci sekali kepada orang yang menulis Tuhan

Yang Maha Esa, dengan “Mahaesa” yang digandeng. Dalam Undang-Undang Dasar, penulisan “Maha Esa” itu dipisah. Kenapa “Maha Esa” harus digandeng sedangkan “Maha Kuasa”, “Maha Kasih” ditulis terpisah? Ini adalah hegemoni makna, perebutan makna. Dalam politik selalu ada perebutan makna juga.

Tetapi, kemudian Pak Harto berubah. Misalnya, mula-mula dia tidak mau shalat Jumat, belasan tahun tidak mau melakukannya, karena kalau shalat Jumat akan dianggap konsesi kepada politik Islam. Tapi akhirnya shalat juga. Siapa yang menganjurkan dia shalat Jumat? Ternyata Jop Ave. Mengapa? Karena Jop Ave merindukan zaman Bung Karno. Bung Karno selalu Jumatan di Masjid Baiturrahim. Pak Harto tidak mau karena tidak aman. Maka kemudian Jop Ave punya ide membuat pagar, yang didukung oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara. Alamsyah juga mendorong terbentuknya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang membangun masjid di mana-mana.

Dengan kebijakan politik Pak Harto seperti itu, maka begitu banyak masjid didirikan, umat Islam menganggapnya sebagai masjid dirar [*dilirâr*]—masjid yang didirikan untuk memecah belah umat. Belakangan anggapan itu berbalik. Apalagi setelah Pak Harto keluar-

masuk Ka'bah, yang menjadikannya Al-Hajj Muhammad Soeharto. Ini penting diperhatikan supaya ironi semacam ini tidak terjadi lagi. Ironis bahwa Masjid Agung Al-Azhar dulu digunakan untuk tablig akbar oleh suatu kelompok yang mendukung Pak Harto sebagai pemimpin Islam, lengkap dengan penyebutan atributnya, Al-Hajj Muhammad Soeharto. Tapi masjid itu juga yang belakangan digunakan untuk tablig akbar oleh kelompok yang sama untuk menghujat Pak Harto. Jadi, situasi ini menggambarkan ironi pada umat Islam. Umat Islam itu lucu sekali dan sering menjadi korban dari kelucuannya.



#### CERMIN DIRI DAN KRITIK PERADABAN ISLAM

Pada zaman mutakhir ini, literatur keislaman dibanjiri oleh bahan-bahan dalam berbagai bahasa Barat yang kaya. Negeri-negeri Muslim bekas jajahan Inggris, misalnya, kini sangat produktif dengan karya-karya dalam bahasa bekas penjajah itu. Salah satu contoh-

nya yang penting adalah Pakistan. Ini merupakan keuntungan tersendiri bagi kaum Muslim yang mengenal bahasa Inggris, apalagi terdapat gejala semakin diterima dan menyebarnya Islam di Barat umumnya dan di Inggris dan Amerika Utara khususnya. Tetapi hal itu

dapat merupakan problem baru bagi kaum Muslim yang tidak mengenal bahasa Inggris, dan bisa menjadi sebab melebarnya jurang intelektual antara yang tersebut terakhir ini

dengan yang pertama. Masalah tersebut merupakan tantangan metodologis tersendiri bagi mereka dalam kajian Islam.

Tetapi problem itu cuma bersifat teknis, menyangkut masalah pengetahuan akan bahasa Inggris. Ada perkara lain yang menimbulkan tidak saja problem teknis, melainkan meningkat menjadi bersifat ideologis, yaitu perkara orientalisme. Perkara inilah yang sering muncul dalam pembicaraan kajian Islam modern. Lebih-lebih lagi semenjak terbit karya Edward W. Said, *Orientalism*, singgungan kepada orientalisme dengan nada yang amat negatif semakin banyak mendapatkan literatur berbahasa Inggris.

Edward Said, seorang Kristen Palestina dan aktivis PLO di Amerika Serikat, dan juga ahli kesusastraan Inggris, membeberkan secara panjang lebar hakikat orientalisme, yang secara keseluruhan tidak lebih dari alat penjajahan bangsa-bangsa Barat atas bangsa-bangsa Timur. Banyak sanggahan pandangan Edward Said, namun tidak dapat ditampik kenyataan bahwa pandangan serupa itu sangat mapan di sebagian besar bangsa-bangsa Timur, dan membuat para orientalis selalu dalam kedudukan yang dicurigai.

Perlu diingat bahwa orientalisme dimulai di Jerman, sebuah negeri Barat yang boleh dikata tidak memiliki jajahan jika dibanding dengan Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Spanyol, dan Portugis. Konon, bangsa Jerman adalah bangsa yang terlebih dahulu tertarik mempelajari Islam, karena temuan mereka bahwa peradaban modern banyak sekali mengandung unsur-unsur yang berasal dari peradaban Islam. Mereka kemudian diikuti oleh para sarjana dari negeri-negeri penjajah, khususnya Inggris, Prancis, dan Belanda.

Orientalis-orientalis kolonial ini pada urutannya banyak menarik ka-

um terpelajar kalangan Timur (Islam) sendiri, sehingga berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah seperti Universitas Kairo di Mesir dan Universitas Amerika Beirut di Libanon, dipenuhi oleh tenaga-tenaga pengajar dan peneliti dari kalangan mereka yang pernah menjadi mu-

rid-murid kaum orientalis di lembaga-lembaga tinggi Barat. Sedemikian rupa jangkauan pengaruh kaum orientalis sehingga *Kulliyat Dâr*

---

Keanekaragaman agama menjadi lebih nyata akibat usaha manusia sendiri untuk membuat agamanya lebih berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengaitkannya kepada gejala-gejala yang secara nyata ada di sekitarnya.

*Al-'Ulûm*, sebagai kelanjutan “proyek” kaum modernis Muslim rintisan Syaikh Muhammad Abduh, juga menjalin hubungan cukup erat dengan lembaga-lembaga ilmiah Barat.

Tampaknya para pengkaji peradaban Islam masih harus mendefinisikan sikapnya yang lebih jelas, objektif, dan konsisten terhadap orientalisme dan kaum orientalis. Pertama-tama karena para sarjana keislaman modern sendiri sekarang ini banyak yang mengembangkan otoritas akademiknya berdasarkan pengalaman akademik mereka dengan kaum orientalis, atau dengan para sarjana Barat, atau non-Muslim (sekalipun dari Timur, seperti Toshihiko Izutzu dari Je-



pang). Sebagai contoh, untuk menyebut beberapa orang saja, mereka ialah Muhsin Mahdi di Harvard, Mahmud Ayub di Temple, Isma'il Al-Faruqi (almarhum) juga di Temple, Seyyed Hossein Nasr di Georgetown, Hamid Algar (seorang Muslim Inggris) di Berkeley, Fazlur Rahman di Chicago, John Woods (seorang Muslim Amerika) juga di Chicago, Robert Bianci (seorang Muslim Amerika) juga di Chicago, Hamid Inayat (almarhum) di Oxford, dan lain-lain.

Dalam konteks pertumbuhan kajian akademik Islam di Indonesia, orang juga akan sulit sekali mengesampingkan arti kehadiran Prof. H.M. Rasyidi, seorang keluaran sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam di Mesir yang melanjutkan ke Paris, dan yang kemudian memperoleh pengalaman mengajar di Kanada. Lepas dari retorika-retorika anti-Baratnya, namun orang tak akan luput mendapati bahwa hampir keseluruhan konstruksi akademiknya dibangun atas dasar lebih banyak unsur yang ia dapatkan dari Barat-tegasnya, kaum orientalis—daripada lainnya. Barangkali setelah Prof. Hussein Djajadiningrat, Prof. Rasyidi adalah intelektual Islam Indonesia yang paling banyak memperoleh tidak hanya pengenalan, tapi malah penyerapan ramuan-ramuan intelektual dari gudang orientalisme. Secara gurau, jika beberapa

waktu lalu dikatakan bahwa Departemen Agama (Depag) didominasi oleh “Mafia McGill”, supaya diketahui saja bahwa “Godfather” Mafia itu ialah Prof. H. M. Rasyidi. Dialah yang paling berpengaruh dalam usaha-usaha mengirimkan para lulusan IAIN atau sarjana lainnya ke Montreal, yang untuk itu banyak orang kini benar-benar harus berterima kasih kepadanya. Dan apa yang telah dirintisnya itu kemudian diteruskan dalam skala yang lebih besar dan penuh harapan baru oleh (mantan) Menteri Agama Munawir Sjadzali, mencontoh ketokohan Prof. H. M. Rasyidi sendiri yang dipandang sebagai pelopor intelektualitas Islam modern.



### CHECK AND BALANCE

Seorang cendekiawan A.S. Jeane Kirkpatrick mengatakan, “Pemilihan demokrasi bukan sekadar lambang ... tetapi pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif, di mana para pengambil keputusan utama dalam pemerintahan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah, menerbitkan kritik mereka dan menawarkan alternatif”. Kutipan ini menegaskan bahwa demokrasi selalu bersifat dinamis. Demokrasi selalu “dalam

keadaan terus bergerak,” baik secara negatif (menjadi mundur) atau positif (maju). Karena itu, demokrasi tidak dapat didefinisikan “sekali untuk selamanya”. Demokrasi adalah “proses demokratisasi.”

Bila suatu masyarakat berhenti berproses menuju kepada yang lebih baik, maka masyarakat itu tidak lagi demokratis! Karena itu, faktor eksperimentasi, dengan coba dan salah, *trial and error* adalah bagian integral dari gagasan demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika ia membuka kemungkinan eksperimentasi terus-menerus, dalam format dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) oleh masyarakat itu sendiri. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”—sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan sesungguhnya—bukanlah demokrasi, melainkan sebuah kediktatoran.

Itulah sebabnya demokrasi memerlukan adanya ideologi terbuka. Atau malah demokrasi adalah ideologi terbuka itu sendiri: sebuah ideologi yang membuka lebar pintu bagi adanya perubahan dan perkembangan lewat eksperimentasi bersama. Falsafah inilah yang membawa demokrasi sebagai satu-satunya sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri, dan membuat perbaikan dan perubahan ke arah kemajuan.

Dalam sistem demokrasi itu mutlak diperlukan pengawasan (*check*), karena demokrasi merupakan sistem yang terbuka untuk semua pemeran-serta (partisipan), dan tidak dibenarkan sama sekali diserahkan kepada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya—betapapun arifnya orang itu. Di samping itu juga diperlukan pengimbangan (*balance*), karena sistem masyarakat dapat dikatakan demokratis hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apa pun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan. Mekanisme *check and balance* inilah yang membuat demokrasi, seperti dikatakan Alexis de Tocqueville, tidak menjadi “tirani mayoritas”. Sebab dengan mekanisme ini terciptalah sebuah sistem yang dalam dirinya terkandung kemampuan mengoreksi dan meluruskan dirinya sendiri, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik, dan terus lebih baik.

Demokrasi memang berpangkal pada pribadi-pribadi yang berkeinginan “baik”. Tetapi karena sifatnya yang pribadi itu, kemauan atau iktikad baik dapat dipandang sebagai “rahasia” yang menjadi urusan pribadi orang bersangkutan. Artinya suatu maksud baik pribadi

hanya akan mempunyai fungsi sosial jika diwujudkan dalam tindakan bermasyarakat yang berdimensi sosial juga, yang tidak dapat dipertaruhkan hanya kepada keinginan baik atau aspirasi pribadi.

Perlunya mekanisme sosial *check and balance* ini tidak boleh diremehkan, karena selalu ada kemungkinan seorang pribadi dikuasai oleh kepentingan dirinya sendiri atau didikte oleh *vested interest*-nya, menuju kepada tirani. *Check and balance* adalah mekanisme yang efektif untuk terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar demi kebaikan bersama. Dan pada urutannya, proses serupa itu memerlukan kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat.

Pada dasarnya, setiap pengekangan kebebasan dan pencekalan atau pelarangan berbicara dan mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntutan demokrasi. Di sinilah kita memerlukan partai oposisi, yaitu partai atau kelompok masyarakat yang senantiasa mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang ada, sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani.

Harus diakui bahwa ide tentang oposisi adalah sebuah temuan modern. Artinya, sebelum zaman modern ini, ide tentang oposisi sebagai kelembagaan yang dibuat

secara *deliberate* belumlah ada. Yang ada pada zaman itu ialah oposisi *de facto* yang lahir dan penerimaannya dalam masyarakat bersifat kebetulan, tidak sengaja, alias *accidental*. Padahal sesuatu yang terjadi hanya secara “kebetulan”—apalagi jika wujud *de facto*-nya ada, tetapi pengakuan *de jure*-nya tidak ada—tidak akan berjalan efektif, malah kemungkinan justru mudah mengundang anarki dan kekacauan karena usaha-usaha *check and balance* berlangsung sekenanya, tanpa dengan penuh tanggung jawab.

Memang, prinsip-prinsip kemauan baik pribadi, komitmen sosial, dan mekanisme pengawasan dan pengimbangan melalui kebebasan-kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat belumlah lengkap dan sempurna. Masih diperlukan adanya sikap tabah dan tulus untuk mendahulukan kepentingan umum dan menysisihkan kepentingan pribadi semata. Ini merupakan hal yang amat berat atas individu-individu, mengingat kecenderungan setiap orang kepada egoisme dan mendahulukan *vested interest*-nya sendiri.

Demokrasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketabahan pribadi untuk kemungkinan melihat dirinya salah dan orang lain benar. Dan ini hanya dapat diatasi jika setiap orang memahami dan menerima demokrasi sebagai pandangan hi-

dup, atau *way of life*. Itu sebabnya demokrasi menuntut adanya tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. Keterbukaan dan kebebasan yang sejati selalu memerlukan sikap-sikap bertanggung jawab, sikap-sikap yang bebas dari egoisme, dan *vested interest*.

Kita hanya akan mampu mendukung pandangan hidup demokratis kalau kita mampu meninggalkan sikap “mau menang sendiri”, dan menerima ketentuan bahwa demokrasi akan menghasilkan diterimanya dan dilaksanakannya hanya sebagian dari keinginan dan pikiran kita. Dalam bahasa politiknya, itu berarti harus selalu ada kesediaan untuk membuat kompromi-kompromi. Apalagi selalu ada kemungkinan bahwa keinginan dan pikiran kita sendiri adalah hasil perpanjangan dari *vested interest* kita, suatu egoisme, subjektivitas kita.

Dalam demokrasi, prinsip “*partial functioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya, harus benar-benar dimengerti, dihayati, dan dipegang

teguh. Sudah tentu demikian pula halnya dalam melakukan oposisi yang merupakan bagian amat penting dari mekanisme *check and balance*, sebagai kekuatan yang akan mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan.



### CIKAL-BAKAL MODERNISME ISLAM DI INDONESIA

Saya sering merasa risih dengan sebutan “neo-Modernis” yang dialamatkan orang kepada saya. Sebab

kadang-kadang yang didengar itu sering lebih baik dari kenyataannya. Itu yang saya khawatirkan. Di zaman Arab Kuno, sebelum Nabi Muhammad Saw., ada sese-

orang bernama Mu’aydi. Ia memiliki reputasi atau nama baik yang sangat harum di seantero Arab karena sangat pemurah, sehingga semua orang ingin melihatnya. Tetapi setiap kali bertemu dengannya banyak yang kecewa karena ternyata mukanya buruk sekali, maka muncullah pepatah, “*Tasma’u bi Mu’aydi khayrun min ‘ayn thawâf.*”

Neomodernisme, sesuai dengan namanya, berarti modernisme baru,

---

*Orang yang hidup di zaman sekarang, yang hanya mementingkan harta, tenggelam dalam urusan badani, sibuk dengan kemegahan palsu, menyia-nyiakan tuntutan akal dan kalbunya hanya untuk kenikmatan muspra itu, dia adalah orang yang terkecoh dari hakikat dirinya, terdinding dari inti hidup.*

di dalamnya terselip semacam kritik kepada modernisme lama. Kaum modernis di Indonesia diwakili dengan baik sekali oleh orang-orang Masyumi—terutama peran mereka memperkenalkan pendidikan modern Barat. Oleh karena itu, dalam modernisme dengan sendirinya terdapat unsur Westernisme; hampir tidak ada orang yang disebut modernis yang tidak memiliki latar belakang pendidikan modern dalam arti Barat.

Orang-orang Muhammadiyah bisa digolongkan sebagai kaum modernis karena ketika Ahmad Dahlan mempunyai ide mendirikan Muhammadiyah, beliau mempunyai akses kepada beberapa bacaan tertentu yang waktu itu agak langka di Indonesia, yaitu tafsir-tafsir kaum modernis di Mesir, terutama tafsir *Al-Manâr* karya Rasyid Ridla. Banyak anekdot mengenai Kiai Dahlan berkenaan dengan tafsir *Al-Manâr* ini, misalnya bahwa beliau mencuricuri membaca kitab tafsir itu karena kalau ketahuan akan dikutuk. Sebab waktu itu, bahkan juga sampai sekarang—tafsir *Al-Manâr* masih kontroversial, artinya masih banyak kalangan Islam yang tidak mau menerimanya.

Itu dari segi ajaran, atau, katakanlah, dari segi akses kepada ajaran atau ide. Tetapi, secara sosio-logis, sebetulnya Kiai Dahlan itu

memberikan respons kepada gejala baru di Indonesia, yaitu tumbuhnya kelompok terpelajar akibat dari introduksi pendidikan Belanda pada permulaan abad ke-20 ini.

Kita tahu bahwa pada permulaan abad ini ada kebijakan Belanda yang disebut Politik Etis akibat adanya desakan-desakan kaum humanis di negerinya sendiri, terutama kaum sosialis. Inti desakan itu adalah agar pemerintah kolonial Belanda tidak memperlakukan rakyat jajahannya terlalu eksploitatif, dan hendaknya mereka diberi kesempatan untuk ikut serta di dalam peradaban Barat. Maka berdirilah sekolah-sekolah Belanda.

Berbeda dengan motivasi semula yang dibawa dari negeri Belanda, realisasinya di sini ternyata kurang etis, terlihat dari masih diterapkannya politik diskriminatif yang sangat ketat. Karena itu penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi empat: *pertama*, kulit putih; *kedua*, Timur Asing; *ketiga*, kaum elite tradisional yang dikenal sebagai kaum priyayi; dan *keempat*, rakyat. Dan ini mempunyai refleksi di dalam sekolah-sekolah yang kemudian didirikan. Untuk kulit putih, sekolahnya ialah ELS (*Elithis Lagers School*) untuk sekolah dasar Eropa; kemudian untuk Timur Asing ada sekolah-sekolah sendiri, meskipun tidak terlalu banyak, misalnya HCS (*Holand Chinesses School*), juga ada *Holand*

*Arabish School*, sehingga tidak heran kalau kemudian banyak orang Arab menjadi menteri; untuk golongan priyayi tentu saja ada HIS (*Holand Indishe School*); lalu untuk rakyat ialah SR (Sekolah Rakyat).

Kebijakan diskriminatif itulah yang kelak menimbulkan respons terutama dari kalangan Islam melalui para ulama, sehingga mendirikan pesantren. Pesantren, termasuk di wilayah konsentrasinya yang paling besar, yaitu kompleks Jombang-Kediri, hampir semuanya berdiri pada awal abad ke-20. Tebuireng yang paling hebat namanya itu masih kalah tua dari pabrik gula yang ada di sebelahnya. Artinya, ketika para santri sedang belajar mengaji di Tebuireng dengan semangat melawan Belanda, di sebelahnya adalah orang-orang Belanda yang justru sedang main tenis.

Jadi, respons pertama ialah bahwa penentangan itu menghasilkan para ulama, karena memang mereka secara tradisional selalu menempuh politik nonkooperatif. Tetapi kemudian dampaknya adalah tumbuhnya kesalehan-kesalehan simbolik, seperti “celana itu haram”, “dasi itu haram”, dan seterusnya. Respons kedua ialah seperti yang ditunjukkan oleh Kiai Dahlan, yaitu melakukan—katakanlah—akomodasi kreatif. Maka Muhammadiyah mendirikan sekolah yang pertamanya dengan program-program yang semuanya Belanda,

yaitu HIS Muhammadiyah, MULO Muhammadiyah, bahkan juga “*Sunday School with Qur’an*”, dan sebagainya. Tegasnya, semua program-program pendidikan Muhammadiyah pada mulanya Belanda.



## CINTA DAN BENCI

Mencintai dan membenci adalah bagian yang amat nyata dari hidup. Mustahil seseorang tidak mencintai sesuatu dan tidak pula membenci sesuatu yang lain. Termasuk cinta dan benci kepada sesama manusia. Dengan cinta yang “membara”, orang terdorong untuk berbuat positif yang besar, yang dalam keadaan biasa mungkin dia tidak sanggup melakukannya. Tapi mungkin juga karena cinta itu pula dia berbuat sesuatu yang amat negatif, yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang yang dianggap menghalangi cintanya. Sebaliknya, karena dorongan kebencian yang memuncak, seseorang mampu melakukan hal-hal negatif yang luar biasa kejinya, seperti, misalnya, pembinasaan orang yang dibencinya. Setiap hari dapat dibaca berita-berita tentang ekses kebencian ini. Namun tidak mustahil kebencian dapat menjadi sumber motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat terpuji, seperti kebencian seseorang kepada musuh bersama dalam suatu

bangsa yang membuatnya menjadi pahlawan yang gagah berani.

Jadi, cinta dan benci termasuk sumber motivasi manusia melakukan sesuatu, yang positif dan yang negatif. Dan di sinilah pangkal persoalannya. Seandainya cinta dan benci itu hanya mendorong untuk berbuat baik saja, maka tidak ada masalah. Tapi karena juga bisa mendorong perbuatan negatif, maka agama kita memperingatkan supaya berhati-hati.

Masalahnya ialah, tidak semua cinta dan benci kita mencapai tingkat yang bisa membenarkan terjadinya peperangan (Arab: *qitâl* “saling membunuh”) patriotik, seperti nilai cinta kepada Tanah Air dan benci kepada musuhnya. Apalagi cinta dan benci dalam skala kecil, dan pada tingkat hubungan pribadi. Tidak jarang kita mencintainya dan membenci secara salah atau salah sasaran. Sesuatu yang seharusnya kita benci, kita cintai; dan yang seharusnya kita cintai kita benci. Maka, bisa jadi hari ini kita mencintainya, lain kali kita membencinya. Sebaliknya kita benci kepada sesuatu, kelak berbalik kita mencintainya. Ini berarti bahwa tindakan-tindakan kita berdasarkan pe-



rasaan cinta dan benci yang keliru itu pun keliru bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

Karena itu agama memperingatkan, kalau membenci sesuatu periksa-lah, jangan-jangan dia mengandung kebaikan untuk kita. Dan kalau mencintai sesuatu, juga telitilah kalau-

kalau dia justru berbahaya bagi kita. Peringatan Ilahi itu dikaitkan dengan masalah perang (Q., 2: 216). Peringatan serupa juga diberikan dalam kaitannya dengan masalah perjodohan

(Q., 4: 19), yaitu hendaknya jangan terlalu mudah melepaskan jodoh kita, betapapun kita merasa benci kepadanya pada suatu saat, sebab mungkin justru dia membawa kebaikan dari Allah di saat yang lain. Dan dikatakan dalam sebuah syair Arab: “*Ahbib habibaka hawnan mâ, ‘asâ an yakûna baghidlaka yawman mâ*” (“Cintailah kekasihmu sekadarnya saja, kalau-kalau suatu hari dia menjadi seterumu. Dan bencilah seterumu sekadarnya saja, kalau-kalau suatu hari dia menjadi kekasihmu”).

Hendaknya tidak disalahpahami. Maksud itu semua bukanlah pengajaran agar kita menjadi orang yang tidak konsekuen, apalagi menjadi *oportunis*. Tetapi hendaknya dalam

masalah cinta dan benci itu kita selalu menimbang dengan baik, agar kelak tidak menyesal. Jadi cinta dan benci pun hendaknya jangan habis-habisan!



## CINTA KASIH ANTARSESAMAMA

Pembicaraan tentang agama Islam kecuali jika dibatasi hanya pada hal-hal yang sama sekali normatif belaka dengan tingkat idealisasi sejarah Islam yang tinggi pasti melibatkan pembicaraan tentang berbagai skisme atau perpecahan dalam agama itu. Kesadaran akan adanya skisme itu akhir-akhir ini, sebagaimana telah sering dibicarakan, muncul dengan kuat di kalangan kaum Muslim Indonesia khususnya dan dunia umumnya karena adanya Revolusi Iran pada 1979. Dengan mengesampingkan beberapa perorangan atau kelompok yang agaknya mengalami kesulitan besar untuk “mengakomodasi” kenyataan-baru berupa peranan amat mengesankan dari kaum Syi’ah dalam percaturan keislaman internasional sekarang ini. Revolusi Iran bagi sebagian orang-orang Muslim menawarkan semacam “hikmah terselubung” (*blessing in disguise*) berupa cakrawala pandangan

keagamaan (Islam) yang lebih meluas.

Karena itu, jika harus disebutkan kegunaan utama pembahasan ini, maka kegunaan itu ialah sebagai bagian dari usaha bersama untuk mendorong lebih jauh kecenderungan positif tersebut. Dengan begitu diharapkan secara berangsur kita dapat mewujudkan dalam kenyataan berbagai angan-angan mengenai umat atau masyarakat Islam yang mendekati gambaran da-

lam Kitab Suci sebagai “*ruhamâ’u bayna hum*” (saling cinta kasih antarsesamanya). Tetapi berbagai pengalaman me-

---

*Menyantuni yatim piatu dan orang miskin dianjurkan tidak hanya sepanjang bulan puasa, tetapi juga terus dapat berkesinambungan sehingga kepekaan batin terus terpelihara.*

nunjukkan bahwa keadaan itu tidak akan tercipta jika kita tidak memiliki cukup kedewasaan dalam sikap keberagamaan kita, dan dalam memandang keberagamaan “orang lain” (dalam pengertian yang seluas-luasnya). Termasuk ke dalam makna kedewasaan itu, kiranya, ialah kesediaan dan kemampuan untuk melihat berbagai kenyataan sejarah secara proporsional, dengan mengakui dan memasukkannya ke dalam hitungan berbagai faktor sejarah sebagai hal yang ikut menentukan apa yang telah terjadi, dan apa yang sedang dan bakal terjadi.





## CINTA SEBAGAI FITRAH

Tujuan berkeluarga ialah mencapai kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta kasih yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan yang akrab antara pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat penting. Pernikahan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara timbal balik, dan untuk membangun keluarga. Karena itu, pernikahan yang setia berada dalam santunan Allah dan perlindungan-Nya, karena pernikahan yang setia itu sesungguhnya dibuat dan ditegakkan di bawah nama-Nya. Kita camkan firman suci berikut, *Wahai sekalian umat manusia! Bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa kemudian dari satu jiwa itu diciptakan oleh-Nya jodohnya, dan dari pasangan dua jiwa itu dikembangkan banyak lelaki dan perempuan. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, yang dalam nama-Nya kamu bermohon, dan jagalah hubungan kasih sayang (tali kekeluargaan). Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi atas kamu sekalian* (Q., 4: 1).

Banyak ahli mengatakan bahwa paham kenisbian yang berlebihan

pada zaman kita sekarang membuat sebagian orang melangkah mundur dari kejelasan moral. Karena takut terlibat jauh dalam sesuatu apa pun, maka sebagian orang menekankan pentingnya sekadar “saling memerhatikan”. Karena tidak sepadan dengan makna mendalam ajaran pernikahan, mereka kemudian cukup puas dengan “kumpul” semata. Mereka mengejar “pemuhan diri” dan “komitmen”, namun mereka selalu dibayangi oleh kenyataan bahwa sekadar omongan tidak akan banyak berfaedah, dan bahwa yang mereka sebut sebagai “komitmen” itu mudah menguap seperti air ditelan gurun.

Perkawinan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekadar “peduli”, “pemuhan diri”, dan “komitmen”. Perkawinan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Sang Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi. Perkawinan menuntut agar masing-masing kita jujur kepada diri sendiri, kepada jodoh kita masing-masing, dan kepada Tuhan. Maka berkenaan dengan hal itu Rasulullah Saw. biasanya akan membaca firman Allah dalam Al-Quran, *Wahai sekalian orang beriman! Bertakwalah kepada*

Allah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Maka Allah akan membetulkan untukmu amal perbuatanmu, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka sungguh telah memperoleh keberuntungan yang agung (Q., 33: 70-71).

Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup dan jujur kepada Allah. Ikhlas tulus dan murni. Jujur kepada pasangan hidup, karena pasangan hidup atau jodoh adalah “pakaian”, dan suami istri adalah pakaian satu untuk lainnya. Allah berfirman, *Mereka (para istri) itu adalah pakaian untuk kamu, dan kamu (para suami) adalah pakaian untuk mereka* (Q., 2: 187).

Sebagai pakaian satu untuk lainnya, maka suami dan istri memerlukan sikap saling membantu, saling mendukung, saling melindungi, dan saling mencocoki sebagaimana pakaian mencocoki tubuh. Dan tujuan kita berpakaian adalah sekaligus untuk perhiasan dan perlindungan badan. Sebagai perhiasan, suami atau istri saling menunjukkan rasa santun, cinta-mencintai, dan memperlihatkan kebahagiaan; dan sebagai perlindungan, masing-masing suami dan istri berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan, dan hak-hak pribadinya.



## CIRI-CIRI KULTUS

Masalah kultus dewasa ini telah menjadi sasaran kajian ilmiah yang melibatkan berbagai disiplin, khususnya antropologi, sosiologi agama, teologi, psikologi, dan lain-lain. Kajian-kajian itu telah menghasilkan banyak bahan bacaan, termasuk yang berupa buku-buku, antara lain *Cults that Kill, Probing the Underworld of Occult Crime* oleh Larry Kahaner (New York: Warner Books, 1989), *Cults, Converts and Charisma* oleh Thomas Robbins (London: Sage Publications, 1988), *Fanaticism, a Historical and Psychoanalytical Study* oleh André Haynal dkk. (New York: Schocken Books, 1980), *Cults in America* oleh Willa Appel (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1983), *The Guru Papers, Masks of Authoritarian Power* oleh Joel Kramer dan Diana Alstad (Berkeley: North Atlantic Books, 1993), dan *Massacre at Waco, Texas, The Shocking True Story of Cult Leader David Koresh and the Branch Davidians* oleh Clifford L. Line-decker (New York: St Martin's Press, 1993). Semua buku itu dalam kajiannya tentang kultus mengarah kepada pencirian umum gejala penyimpangan keagamaan, yakni:

1. Kultus sebagai bentuk pemujaan selalu berpusat kepada otoritas pribadi sang pemimpin. Ia menecakam para pengikutnya se-

hingga tumbuh *mindset* kepatuhan, ketundukan, dan ketergantungan kepadanya yang sangat kuat.

2. Karenanya, kultus selalu membentuk sebuah komunitas “orang yang percaya” dengan pola organisasi yang ketat, yang sedikit sekali memberi kemungkinan anggotanya untuk keluar.
3. Gabungan antara otoritarianisme sang pemimpin dengan pola keorganisasian yang ketat menghasilkan sebuah gerakan penuh rahasia (*cabbalistic*), yang menganut pandangan perlunya menjaga “kesucian” kelompok dengan menghindari dari kontak dengan pihak lain, khususnya kontak yang bersangkutan dengan masalah ajaran. Kontak dengan pihak lain dipandang sebagai sumber “polusi” kepada kemurnian ajaran mereka.
4. Maka tidak heran banyak kultus yang kemudian mengembangkan pandangan-pandangan dan sikap-sikap antisosial, dari penolakan membayar pajak (seperti kasus-kasus Moonisme dan kelompok Bhagwan Shri Rajneesh) sampai kepada penggunaan kekerasan semisal pembunuhan (seperti kasus Satanisme dan New Nation).
5. Karena faktor-faktor tersebut itu, maka kejahatan oleh kultus sulit sekali dilacak dan diatasi. Be-

berapa anggota polisi di Amerika yang terlibat langsung dalam usaha mengatasi masalah ini menggambarkan masalah kejahatan kultus sebagai berikut:

*Kejahatan okultisme mungkin merupakan bidang yang paling sulit dalam tugas kepolisian hari ini. Anda tidak mendapatkan kasus sederhana dengan tersangka yang jelas. Anda akan dapati sedikit demi sedikit, bukti yang menemui jalan buntu, kesaksian yang selalu mencurigakan dan kejahatan demikian liar dan menjijikkannya sehingga bahkan kebanyakan opsir polisi pun tidak mau mempercayai bahwa hal semacam itu ada.*

*Semua agama okultisme ini berkembang menjadi buruk ketika orang tidak lagi puas untuk hidup dalam lingkungan yang mereka ciptakan sendiri. Tidak cukup hanya mempunyai kekuasaan terhadap diri mereka sendiri, mereka ingin mengontrol langit dan juga sesamanya. Jika kebutuhan kepada kekuasaan yang lebih banyak itu tumbuh, maka bertambah pula kejahatan okultisme. Ia menarik orang-orang yang tidak puas; mereka menginginkan kekuasaan yang lebih banyak. Semakin Anda berkuasa, semakin banyak orang yang dapat Anda kuasai, dan pada urutannya Anda pun semakin berkuasa.*

6. Banyak kultus mengajarkan pandangan dunia yang bersemangat apokaliptik (dunia akan segera binasa atau kiamat), terkadang dengan ramalan yang pasti tentang kapan hal itu bakal terjadi (seperti pada kasus ajaran

---

*Setiap orang diminta sesuai dengan kemampuannya, dan kepada setiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.*

James Jones dari kultus *People's Temple*). Karena itu, banyak ajaran kultus yang juga mengandung “alarmisme”, yaitu peringatan terhadap bahaya zaman yang bobrok, dan janji keselamatan yang pasti kepada siapa saja yang mau bergabung dengan mereka.

7. Pandangan apokaliptik dan alarmisme biasanya bergandengan dengan messianisme atau mileniarisme, yaitu pandangan hidup yang disemangati oleh penantian yang penuh percaya akan datangnya juru selamat dari langit (gaib, meskipun tampil dalam bentuk manusia). (Misalnya, gerakan Mbah Suro di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur pada saat-saat berakhirnya Orde Lama memiliki ciri kultus yang sangat kuat, dengan semangat messianisme dan mileniarisme rakyat di kalangan orang Jawa yang sudah terkenal, yaitu paham dan harapan akan tampilnya “Ratu Adil”).

Maka tampak jelas bahwa inti dari kultus, sebagaimana ditunjukkan perkataan “kultus” itu sendiri, ialah otoritarianisme seorang tokoh pemimpin, ketatan dan ketergantungan para pengikut kepadanya, dan, akibatnya, perampasan kemerdekaan dan kebebasan pribadi.



#### CITA-CITA KEADILAN

Penting sekali kita sadari dan ketahui, bahwa adanya tensi moral itu tidak hanya menjadi monopoli masyarakat-masyarakat kapitalis, atau masyarakat “kapitalis malu-malu” (cemooh yang dilontarkan Dr. Arief Budiman untuk sistem kita di Orde Baru ini). Seperti dikatakan oleh Julius Nyerere—seorang tokoh sosialis-humanis paling terkemuka di Afrika—negeri-negeri komunis pun menunjukkan gejala-gejala bertingkah laku seperti kaum kapitalis. Bahkan mereka itu, menurut Harrington, tidak hanya melakukan penindasan ekonomi dan kekayaan material belaka seperti masyarakat kapitalis, tetapi juga melakukan perampasan hak kebebasan politik negara-negara “satelit”. Dalam kaitan ini Nyerere menyatakan, “Negeri-

negeri Sosialis, tidak kurang dari negeri-negeri kapitalis, bersiap-siap untuk bertingkah laku seperti jutawan—yaitu menggunakan jumlah berjuta-juta untuk menghancurkan “jutawan” yang lain, dan jutawan yang lain itu tidak mesti seorang jutawan kapitalis—terdapat kemungkinan yang sama untuk menjadi “jutawan” sosialis. Dalam perkataan lain kekayaan sosialis sekarang menenggang kemiskinan, yang kemiskinan itu adalah lebih-lebih lagi suatu kejahatan yang tak terampuni ... jangan lupa bahwa negeri-negeri kaya ... juga bisa ditemukan pada sisi lain pembagian antara negeri-negeri kapitalis dan sosialis.”

Semua keterangan di atas memang dapat menimbulkan kebimbangan dan rasa tidak pasti. Tetapi, barangkali benar jika dikatakan bahwa lebih baik bimbang daripada berpasti-pasti (*assertive*), namun ternyata salah. Seperti dikatakan Ackerman, di satu pihak, seseorang barangkali menindas keraguan sendiri, dengan sikap menolak untuk mempertimbangkan apakah sungguh pandangannya itu beralasan. Tetapi, dengan sikap ini berarti dia menutup sama sekali kemungkinan untuk dirinya dari mendapatkan jawaban dan solusi persoalannya secara benar atau secara lebih tepat.

Di pihak lain, seseorang barangkali “mengatasi” (*transcend*) keragu-

annya. Keraguan ini bisa diatasi setelah secara langsung dia menghadapi kemungkinan bahwa keraguannya itu mungkin berguna, namun selanjutnya dia berkesimpulan bahwa keraguannya itu tak berdasar. Jalan ke arah pengetahuan tentang hal yang baik lebih terbuka untuk orang yang “mengatasi”—bukannya “menindas”—keraguan-nya sendiri. Kalau kita hanya berpura-pura bahwa kita tidak ragu, kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tentang apa yang harus kita katakan jika memang mempunyai keberanian untuk secara langsung berhadapan dengan permasalahan dilematis. Tetapi sebaliknya, sikap ragu yang total dan sempurna juga tidak mungkin. Jika kita membuang begitu saja keyakinan kita yang ada sekarang, maka bagaimana kita bisa membuat hidup ini bermakna, dan bagaimana kita memperoleh dorongan batin yang sejati untuk mencari pemecahan masalah?

Maka persoalan pokoknya selalu sama untuk setiap cita-cita besar dan luhur. Tidak seorang pun bisa berharap akan menemukan pemecahan sederhana bagi masalah tarik-menarik antara dorongan alami untuk memenuhi keinginan diri sendiri dan tuntutan ideal untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam masyarakat Pancasila pun, diharuskan adanya sikap realistik untuk menghadapi kenyataan ini.

Jika pihak si “kuat” senantiasa tergelincir pada sikap-sikap pembelaan diri tanpa memerhatikan segi-segi dasar pembenaran—yakni, tanpa peduli kepada cita-cita luhur kesepakatan bersama—dan jika saja si “lemah” tetap saja bermimpi untuk suatu saat ganti menindas kaum penindas, maka cita-cita keadilan sosial dalam kerangka keseluruhan Pancasila itu sendiri mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Yang diperlukan di sini ialah bagaimana kita mampu mentransformasi dilemma moral kita menjadi sumber daya cipta, untuk menciptakan pola kehidupan yang memungkinkan penyusunan sistematis berbagai kenyataan yang tidak selalu beresesuaian di depan kita. Dengan begitu—melalui usaha masing-masing pribadi kita meskipun dengan cara-cara yang masih belum sempurna—kita bisa mencari kunci jawaban atas misteri kebebasan pribadi.



### CITA-CITA KEADILAN SOSIAL

Tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kita semua telah mengetahui kedudukan cita-cita itu dalam kehidupan bernegara kita. Ia merupakan sumber tujuan sebenarnya Republik yang merdeka ini, dan merupakan sumber semangat bagi mereka yang hendak berdarma

kepada rakyat. Sebagai cita-cita resmi yang terkandung dalam konstitusi, maka yang pertama kali berkewajiban mengembangkannya ialah mereka yang memperoleh kepercayaan rakyat untuk mengemudikan kapal Republik, yaitu pemerintah beserta semua unsurnya.

Setelah kita semua menyakini keadilan sosial sebagai nilai dan cita-cita, maka tinggallah memikirkan bagaimana melaksanakannya. Dan karena cita-cita itu tidak merupakan monopoli kita sendiri, bangsa Indonesia, melainkan akhir-akhir ini juga merupakan bahan pembahasan yang terhormat di kalangan bangsa-bangsa di dunia, maka sekarang banyak buku dan karangan dibuat orang yang mencoba menjelaskan cara-cara mewujudkan keadilan sosial itu. Tetapi, George Bernard Shaw menasihatkan agar kita tidak membaca sebaris pun buku-buku dan karangan-karangan itu, sebelum mendiskusikannya dengan kawan-kawan terdekat kita sendiri, untuk kemudian mengambil kesimpulan sebaik mungkin tentang bagaimana seharusnya kekayaan nasional dibagi di antara seluruh rakyat di dalam suatu negara beradab dan terhormat.

Hal demikian itu terjadi, karena setiap pikiran tentang pelaksanaan cita-cita itu tidak lebih daripada pikiran. Dan pikiran orang-orang lain belum tentu lebih baik dari-

pada pikiran-pikiran kita sendiri, dan begitu pula sebaliknya. Berapakah kita harus memperoleh bagian dari harta kekayaan yang ada ini, dan berapa pula yang harus diperoleh tetangga kita? Bagaimana jawabannya terserah pada Anda sendiri.

Karena menjawab pertanyaan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, maka kita harus terlebih dahulu membersihkan benak kita dari gambaran yang tertanam sejak masa kanak-kanak, bahwa lembaga-lembaga di mana kita hidup sekarang ini, termasuk cara-cara yang sah dalam membagikan pendapat dan mengizinkan seseorang memiliki harta, adalah sesuatu yang memang sudah semestinya terjadi secara alamiah sebagaimana halnya udara di sekeliling kita. Hal itu demikian, karena pola-pola yang melembaga itu kita dapati di mana-mana—kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya bahwa hal-hal itu memang telah ada dan harus ada untuk selamanya—timbul dengan sendirinya.

Ini adalah suatu kekeliruan yang berbahaya. Lembaga-lembaga itu sepenuhnya dapat diubah. Dan memang, mereka berada dalam proses perubahan terus-menerus sepanjang masa. Pola-pola tersebut tidak akan diikuti atau ditaati oleh “orang-orang baik” sekalipun jika

tidak ada polisi yang dapat segera dihubungi dan ancaman hukuman penjara yang selalu terbayang.

Salah satu hal yang dapat kita pikirkan perubahannya ialah pola-pola dan *value judgement* tentang bagaimana kita menggunakan kekayaan, sekalipun kekayaan itu adalah milik sah kita sendiri. Sebagai contoh sederhana, kita memiliki kekayaan sebesar seribu rupiah (di sini harus dianggap bahwa mempunyai seribu rupiah sudah termasuk kaya), maka menurut rasa keadilan sosial, kekayaan sebesar itu dapatkah kita pergunakan untuk berbelanja bagi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, seluruhnya atau kurang dari seribu rupiah? Atau bagaimana jika suatu cara lain dapat diperoleh?

Di atas telah disebutkan tentang *value judgement*. Memang, suatu pola penggunaan harta menyangkut tata nilai seseorang. Karena itu, hal tersebut tidak selalu berhubungan dengan persoalan benar salah, tetapi terutama menyangkut rasa tata hormat dan tidak terhormat, bahagia dan tidak bahagia. Umpamanya, jika kita berpandangan bahwa kehormatan dan kebahagiaan terletak pada kekayaan yang tampak dan dapat dilihat orang lain (lebih-lebih jika mampu menerbitkan rasa iri hati pada mereka), maka sudah tentu pola penggunaan harta yang kita anut ialah pola penggunaan

harta yang maksimal. Bahkan mungkin akan berusaha menunjukkan kekayaan lebih dari kemampuan kita sendiri, sehingga pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan, sekalipun menurut ukuran masyarakat, sebetulnya kita termasuk kaya dan mampu. Pola

penggunaan harta yang amat konsumtif itu, oleh para ahli disebut (dalam istilah asing) *demonstration effect*.

Mereka mensinyalir bahwa hal itu merupakan halangan terbesar dalam usaha mewujudkan masyarakat “adil dan makmur”. Dan memang, kita tidak sulit untuk mengetahui ketidakbenaran pola itu, sebab tidak sesuai dengan “hati nurani” kita sendiri. Sayangnya, dalam masyarakat terdapat kecenderungan yang mendorong semakin kuatnya pola *demonstration effect*, khususnya bagi mereka yang untuk pertama kalinya menikmati apa artinya merdeka yang berupa keleluasaan dan fasilitas-fasilitas. Padahal *demonstration effect* akan mendorong seseorang untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain.

Tetapi, tidaklah berarti bahwa hal sebaliknya sama sekali adalah baik. Sebab, kepelitan dalam bentuknya yang ekstrem, tidak kurang

berbahayanya bagi cita-cita masyarakat adil dan makmur. Jika kita pelit pada diri sendiri, tentunya kita akan lebih pelit lagi kepada orang-orang lain khususnya kepada pihak yang paling memerlukan perhatian dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, yaitu kaum tak mampu. Jika

semua orang kaya menganut pola ini, maka usaha-usaha di bidang sosial tidak akan berjalan, seperti panti-panti

asuhan, rumah-rumah perawatan orang sakit, wisma penyantunan orang-orang cacat, dan lain-lain. Dengan demikian, kekayaan yang ada di tangan orang-orang penganut *demonstration effect* akan kehilangan fungsi sosialnya, karena habis untuk menuruti nafsu pamernya sendiri. Begitu pula, harta itu pun akan kehilangan fungsi sosialnya di tangan orang-orang pelit, karena harta itu disimpannya rapat-rapat untuk memuaskan nafsu menghitung-hitung harta dan menumpuk-numpuknya, seakan-akan ia akan hidup kekal dengan hartanya itu.



#### CITA-CITA KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM

Suatu cita-cita di bidang ekonomi adalah salah satu yang amat



jelas dalam Kitab Suci. Cita-cita itu, menurut ungkapan jargon modern, boleh disebut sebagai suatu cita-cita tentang keadilan sosial. Adanya cita-cita itu dapat kita rasakan denyut nadinya yang kuat dalam tema-tema yang menandai surat-surat atau ayat-ayat yang semuanya termasuk yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah. Keprihatinan Nabi mengenai masyarakat Makkah, sebagaimana terpahami dari tema-tema tersebut, ialah politeisme dan kezaliman (ketidakadilan) sistem ekonominya. Politeisme dipandang sebagai dosa yang tak terampuni (Q., 4: 48 dan 116), karena ia merupakan kejahatan terbesar manusia kepada dirinya sendiri (Q., 31: 13).

Tingkah laku ekonomi yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi, terwujudnya keadilan sosial dikutuk dengan keras, bahkan agaknya tidak ada kutukan Kitab Suci yang lebih keras daripada kutukan kepada pelaku ekonomi yang tidak adil. Selain dapat dirasakan dalam, antara lain, ekspresi surat Al-Takâtsur (Q., 102) dan Al-Humazah (Q., 104) suatu kutukan kepada sikap ekonomi yang tidak



produktif dan egois dengan jelas sekali dinyatakan dalam Q., 9: 34-35: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan para rahib dan pertapa itu benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar dan menyimpang dari jalan Allah.*

*Adapun mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menggunakannya di jalan Allah, maka peringatkanlah mereka itu dengan adanya siksa yang pedih. Yaitu suatu ketika harta (emas*

*dan perak) itu dipanaskan dalam api neraka, kemudian diseterikakan kepada kening, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan kepada mereka): "Inilah yang kamu tumpuk untuk kepentingan diri kamu sendiri (di dunia), maka sekarang rasakanlah (akibat) harta yang dulu kamu tumpuk itu".*

Firman itu dikutip karena, secara dramatis, melukiskan tema antike-tidakadilan ekonomi yang ada dalam Islam. Semangat ini sebetulnya berjalan sejajar dan konsisten dengan semangat yang lebih umum, yaitu keadilan berdasarkan persamaan manusia (egalitarianisme). Bahkan dalam agama-agama mono-teis, egalitarianisme itu, dibanding

dengan agama-agama lain, bersifat radikal. Dampak semangat itu tidak hanya terasa dalam bidang yang menjadi konsekuensi langsungnya, yaitu ekonomi, tapi juga di bidang budaya, umumnya, dan seni, khususnya. Islam, demikian pula agama Yahudi dan Kristen Klasik, tapi juga Zoroastrianisme (Majusi, khususnya Mazdaisme), dikenal dengan sikapnya yang antigambar (ikonoklasme), terutama antigambar representasional yang bersifat simbolis dan emblematis, apalagi yang magis (yaitu setiap gambar yang mengungkapkan suatu mitologi kepada alam). Salah satu ide dasar sikap itu ialah bahwa magisme menghalangi manusia dari mencapai keadilan berdasarkan persamaan dan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terawasi (terkontrol). Kita mengetahui bahwa penyelesaian yang diberikan oleh peradaban Islam kepada semangat ikonoklastis ialah pengembangan seni kaligrafi dan arabesk. Kaligrafi mengekspresikan paham ketuhanan yang abstrak (dalam arti, Tuhan yang tidak bisa dilukiskan), dengan menekankan pernyataan diri Tuhan melalui wahyu. Jadi, kaligrafi kebanyakan dicurahkan untuk mengekspresikan kekuatan wahyu itu. Sedangkan arabesk merupakan pengembangan rasa keindahan yang bebas dari mitos alam, dan dilakukan dengan mengembangkan pola-pola abstrak

yang diambil dari pengolahan motif bunga-bunga, daun-daunan, dan poligon-poligon.

Tapi ada titik rawan (*crucial*) di sini. Yaitu, bahwa seni abstrak justru berkembang dalam kalangan penduduk kota (urban), karena lingkungan hidup mereka yang lebih bebas dari mitos alam (tidak seperti para petani). Suatu pandangan sosiologis bahwa Islam adalah gejala kota, tidaklah terlalu meleset, yang juga bisa dilihat dari sudut gaya seninya. Namun seni, tentu saja, hanyalah salah satu ekspresi dari keseluruhan semangat Islam. Dan semangat itu juga diekspresikan dalam bidang lain. Di bidang ekonomi, ekspresi Islam sebagai gejala kota ialah merkantilisme, semangat dagang. Ini kemudian ditunjang oleh posisi geografis negerinegeri Timur Tengah dan kondisinya. Dan Makkah adalah “miniatur” posisi dan kondisi itu, yang di zaman Nabi merupakan sebuah kota dagang yang amat makmur.



### CIVIL SOCIETY

Banyak yang mengatakan bahwa *icon* kecenderungan global demokratisasi ialah *civil society*. Berhadapan dengan penindasan di Amerika Latin, Eropa Selatan dan Timur, *civil society* kerap dipandang ber-

jasa dalam menghalangi rancangan kekuasaan otoriter dan dalam menentang pemerintahan sewenang-wenang. Walaupun begitu, *civil society* tidaklah menumbangkan pemerintahan, yang jika dilanda korupsi merajalela dalam kalangannya sendiri dan kehilangan pijakan legitimasinya, biasanya tumbang dari dalam. *Civil society* lebih merupakan penerima manfaat (*beneficiary*) ketimbang sebuah kekuatan penghancur.

Lebih dari itu, *civil society* sering diidealisasikan sebagai suatu kebaikan sempurna. Sama halnya dengan semua gejala sosial, *civil society* dapat, dan sering, punya sisi-sisi buruk. Sikap mementingkan diri sendiri, prasangka, dan kebencian tidak jarang berjalan seiring dengan altruisme, sikap adil, dan santun. Kiprah *civil society* yang bebas tak terkekang bukanlah suatu gagasan yang harus disambut hangat, melainkan pikiran yang sungguh mengerikan. Setiap *chaos* akan mudah menjadi dasar pembenaran tampilnya orang kuat yang hendak mengatasinya, sehingga *civil society* dengan kiprah bebas tak terkendali akan justru menciptakan lawannya sendiri, yaitu otoritarianisme seorang kuat.

Adanya masyarakat madani atau *civil society* mengisyaratkan identitas yang dipunyai bersama, setidaknya melalui persetujuan tidak langsung tentang garis-garis besar batas-batas

pranata politik. Dengan kata lain, kewargaan, dengan hak dan tanggung jawabnya, adalah bagian utuh dari pengertian *civil society*. Kewargaan memberi landasan masyarakat madani. Menjadi bagian dari keseluruhan adalah prasyarat bagi keseluruhan itu untuk menjadi suatu masyarakat. Kalau tidak, masyarakat tidak akan mempunyai keutuhan, bagaikan bejana yang penuh dengan onderdil-nderdil yang terpisah-pisah. Karena itu, pribadi dalam *civil society* diakui hak-hak dasarnya oleh negara, tapi, sebagai imbalan, ia dituntut menunaikan kewajibannya kepada negara. Semua pemerintahan, khususnya yang otokratis, cenderung meremehkan kewargaan, dengan menuntut dukungan warga dan penampilan seremoni patriotik, namun pada saat yang sama hanya dalam ucapan menyatakan penghargaan kepada hak-hak kewargaan. Ketika negara karena kegagalannya telah kehilangan kepercayaan warganya, kewargaan itu sendiri akan menjadi sasaran pengorbanan yang pertama. Ketika legitimasi pemerintahan runtuh, *civil society* juga terancam untuk mengalami fragmentasi. Karena itulah tidak punya makna apa-apa membicarakan *civil society* tanpa negara yang cukup tangguh.

*Civil society* adalah lebih daripada sekadar campuran berbagai bentuk

asosiasi. Pengertian *civil society* juga mengacu kepada kualitas *civility*, yang tanpa itu lingkungan hidup sosial akan hanya terdiri dari faksi-faksi, klik-klik, dan serikat-serikat rahasia yang saling menyerang. *Civility* mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial; juga kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah. Dan penting sekali diperhatikan ada tidaknya *civility* itu dalam diri serikat-serikat yang ada, selain dalam hubungan antara berbagai serikat itu satu sama lain. Ironisnya, kelompok-kelompok yang memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai terpuji lainnya kerap tidak mencerminkan nilai-nilai itu dalam diri kalangan mereka sendiri ataupun pribadi para tokohnya.

Celakanya, *civility* adalah suatu mutu yang banyak hilang di negara-negara berkembang. Mungkin suatu negara menjunjung tinggi kehidupan keserikatan (*associational life*) yang aktif, tapi cukup sering di negara itu *civil society* dirongrong oleh kurangnya toleransi politik dan terkekang oleh peraturan pemerintah yang sewenang-wenang. Tidak adanya *civility* menimbulkan sikap ragu tentang prospek jangka pendek demokrasi dalam suatu negara. Tetapi jika seni berserikat dapat dimengerti de-

ngan baik, maka peningkatan *civil society* akan menjadi bermakna lebih daripada sekadar menciptakan dasar-dasar demokrasi. Ia sendiri menjadi *milieu* bagi kehidupan sosial yang sehat.

Ketika kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan muncul, biasanya tampil dalam bentuk gerakan pembela hak-hak asasi dan perbaikan harkat atau *dignity* kaum lemah atau tersisih. Gerakan seperti itu dengan sendirinya menegaskan klaim moral yang asasi, yaitu harkat kemanusiaan universal dan persamaan semua orang. Karena klaim demikian itu benar-benar mendasar, maka tidak mudah ditolak atau disanggah terang-terangan oleh para pemegang kekuasaan negara. Akibatnya, gerakan hak-hak asasi dan perbaikan harkat kaum lemah boleh jadi menikmati kebebasan berkorporasi yang lebih besar daripada kekuatan-kekuatan oposisi atau kelompok-kelompok yang menghendaki realokasi sumber-sumber daya ekonomi melalui tuntutan pemerataan, misalnya. Gerakan hak-hak asasi dan pembelaan martabat kaum lemah juga mungkin lebih kebal terhadap kooptasi, karena tuntutanannya mungkin tidak mudah ditebus, dibayar, atau disuap dengan hak-hak istimewa atau privileji tertentu, kedudukan, atau uang untuk pribadi-pribadi para pejuangnya.

END

## CIVIL SOCIETY: RUMAH DEMOKRASI

Ketika kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan muncul, biasanya mereka tampil dalam bentuk gerakan pembela hak asasi dan perbaikan harkat atau *dignity* kaum lemah atau tersisih. Gerakan seperti itu dengan sendirinya menegaskan klaim moral yang asasi, yaitu harkat kemanusiaan universal dan persamaan semua orang. Karena klaim yang demikian itu benar-benar mendasar, maka tidak mudah ditolak atau disanggah terang-terangan oleh para pemegang kekuasaan negara mana pun di seluruh dunia. Akibatnya, gerakan hak asasi dan perbaikan harkat kaum lemah boleh jadi menikmati kebebasan berkorporasi yang lebih besar daripada kekuatan-kekuatan oposisi atau kelompok-kelompok yang menghendaki pembagian kembali sumber-sumber daya ekonomi melalui tuntutan pemerataan, misalnya.

Gerakan hak asasi dan pembelaan martabat kaum lemah juga mungkin lebih kebal dari kooptasi, karena tuntutanannya mungkin tidak mudah ditembus, dibayar, atau disuap dengan hak istimewa atau privileji tertentu, kedudukan, atau uang untuk pribadi-pribadi para pejuangnya. Meskipun unsur-unsur masyarakat madani boleh jadi berdiri tegak sebagai oposisi terhadap

pemerintah, pemerintah sendiri tidak boleh melupakan peran pokoknya selaku wasit, pembuat aturan, dan penertib masyarakat madani. Sebab, masyarakat madani atau *civil society* itu, bagaimanapun bukanlah pengganti pemerintah. Terlalu sering muncul harapan *civil society* merupakan obat mujarab, namun bukti menunjukkan dengan jelas bahwa negara mempunyai peran kunci untuk ikut mendorong pertumbuhan demokrasi. Demokrasi bukanlah musuh bebuyutan atau pun kawan setia bagi kekuasaan negara. Negara dituntut untuk mampu menangani *civil society* sebegitu rupa sehingga tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Sebaliknya, kalangan *civil society* harus senantiasa menyadari bahwa demokrasi masyarakat tidak dapat dibina melalui kekuasaan negara. Memang benar, sebagaimana menjadi keyakinan banyak sarjana, *civil society* adalah musuh ilmiah otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain tentang kekuasaan arbitrer. *Civil society* adalah bagian organik demokrasi, dan ia menurut definisinya sendiri adalah lawan rezim-rezim absolutis. Tapi mengkhawatirkan *civil society* akan mampu menumbangkan pemerintahan adalah sikap yang naif. Bahkan sebenarnya saling berbenturan antara pemerintah dan *civil society* lebih sering didefinisikan

dalam kerangka kerja sama daripada konflik. Karena itu, di negara-negara dengan susunan kekuasaan tidak demokratis, kita perlu adanya strategi-strategi yang halus. Kita memerlukan suatu kerangka yang memberi peluang kepada warga masyarakat untuk mengikat tali hubungan dengan pemerintah pada suatu saat, dan pada saat yang lain mungkin mengendurkan atau malah melepaskan ikatan itu, namun dengan tanggung jawab.

Kita juga perlu ruang bagi adanya ikatan antara negara dan *civil society* baik yang sejalan maupun yang bersimpangan jalan. Dan dari segi kepraktisan, tidaklah realistis mengharapkan serikat-serikat kewargaan untuk memikul tugas oposisi dalam konteks negara yang penguasanya sering menyamakan antara oposisi dan pembangkangan.

Berkaitan dengan itu, dapat diamati banyaknya pemimpin politik yang bersedia melakukan liberalisasi, namun sedikit sekali yang bersedia melakukan dan mendukung demokratisasi. Liberalisasi mengacu hanya pada tindakan perbaikan untuk membuka jalan keluar bagi kebebasan menyatakan pendapat, membatasi pelaksanaan kekuasaan yang arbitrer, dan membiarkan tumbuh serikat-serikat politik, hal mana tentu saja tidaklah terlalu buruk. Tapi sebaliknya, demokratisasi, menuntut pemilu yang

benar-benar bebas, partisipasi rakyat umum dalam kehidupan politik, serta—dalam bahasa yang gamblang—melepaskan belenggu yang membatasi kebebasan orang banyak atau massa.

Kesediaan pemerintah melakukan liberalisasi dalam artian tersebut diduga karena dan diharapkan dapat mempertinggi tingkat kesuksesan, sehingga mengukuhkan legitimasinya sebagai pemerintah; sementara demokrasi dihalangi karena secara keliru diduga, dan dikhawatirkan, akan merongrong pemerintahan. Inilah tantangannya di masa reformasi ini: bukan hanya melakukan liberalisasi politik, tetapi juga sekaligus demokratisasi. Dan sekaligus *civil society* menjadi rumah untuk proses demokrasi itu.

✻

